

BAB III

IDEOLOGI

A. Sejarah dan Pengertian Awal Ideologi

Kata ‘ideologi’ memang memiliki konotasi yang sedemikian buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ia diasosiasikan dengan penipuan, mistifikasi, pembodohan, dan konflik politik. Namanya pun lekat dengan irasionalitas, emosional, dan fanatisme buta. Ideologi lekat dengan memori kekerasan dan konflik perang antara blok Barat yang dikomandani AS dan blok Timur di bawah kendali US yang semakin arogan.

Apalagi sejarah perang ideologi telah memakan korban jutaan manusia dalam perang dunia kedua, ditambah jutaan lainnya korban pemerintahan fasisme Nazi Jerman pimpinan Hitler. Usai perang dunia yang dimenangkan blok Barat dan kemenangan paham neoliberalisme dalam ekonomi perdagangan, lalu para pengamat pun buru-buru mengklaim bahwa abad ke-20 ini adalah masa berakhirnya ideologi-ideologi dunia—yang dikemudian hari asumsi-asumsi ini jauh dari kebenaran. Suatu masa yang penuh diwarnai dengan kekerasan, intrik, dan konflik politik.

Pandangan pejoratif¹ tentang konsep ideologi ini sebenarnya bisa ditelusuri dari sejarah dipergunakannya istilah ideologi sendiri. Istilah ini adalah derivasi dari *Ideologues* yang muncul paska Revolusi Perancis.² Napoleon Bonaparte menggunakan istilah ideologi untuk menyerang lawan-lawan politiknya yang memiliki ide-ide yang tidak realistis berkaitan dengan kepentingan-kepentingan negara Perancis baru saat itu.

Secara etimologi (bahasa), ideologi berasal dari kata *Idea* yang berarti pikiran, dan *Logos* yang memiliki makna Ilmu. Jadi makna secara istilahnya, ideologi berarti studi tentang gagasan, pengetahuan kolektif, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, nilai-nilai, prakonsepsi-prakonsepsi, pengalaman-pengalaman, dan atau ingatan tentang informasi sebuah kebudayaan dan juga rakyat individual.³ Definisi lain menjelaskan bahwa ideologi merupakan ide atau sistem, dengan kata lain ide yang diperlakukan sebagai mitos kehidupan dan acapkali sering dipaksakan pada orang lain yang mungkin tidak menerima kebenarannya.⁴ Filsuf Perancis, Antoine Destutt de Tracy yang pertama kali menciptakan istilah Ideologi pada tahun 1796, mendefinisikan ideologi sebagai Ilmu tentang pikiran manusia (sama seperti biologi dan zoologi yang merupakan ilmu tentang spesies) yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa

¹ David Mc Lelland, *Ideologi; Tanpa Akhir*, terj. Muhammad Syukri (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005), hlm. 1

² John B. Thompson, *Analisis Ideologi; Kritik Wacana Ideology-Ideologi Dunia*, terj. Haqqul Yakqin (yogyakarta, IRCISOD, 2007), hlm. 13

³ *Ibid.*, hlm. 17

⁴ John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global; Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, terj. Haqqul Yaqqin (yogyakarta, IRCISOD, 2006), hlm. 17-18

depan.⁵ Tegasnya ideologi merupakan seperangkat nalar berfikir yang mempunyai visi terhadap perkembangan suatu peradaban.

Beberapa kalangan mendefinisikan istilah ideologi sebagai sebuah doktrin yang ingin mengubah dunia. Ada juga yang mengualifikasikan ideologi sebagai sesuatu yang visioner tapi, lebih banyak lagi mengualifikasikannya sebagai sesuatu yang bersifat hipotetis, tak terkatakan, dan tidak realistis, bahkan lebih dari itu, adalah sebuah penipuan kolektif oleh seseorang atau yang lain, yang mengarah pada pembenaran atau melegitimasi subordinasi satu kelompok oleh kelompok lain, dengan jalan manipulasi sehingga menyebabkan ketidaknyamanan yang berhubungan dengan kekerasan sistematis dan teror yang kemudian berujung pada imperialisme, perang, dan pembersihan etnis.

Di tangan de Tracy, pengertian ideologi bersifat netral, jauh dari makna yang telah dijelaskan di atas. De Tracy berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui benda-benda dalam dirinya, akan tetapi hanya melalui ide-ide yang terbentuk berdasarkan sensasi kita terhadap benda-benda tersebut. Jika kita akan mengenali ide dan sensasi secara sistematis, kita harus memiliki latar belakang seluruh pengetahuan ilmiah yang kuat dan dapat menarik kesimpulan secara lebih praktis.⁶ Nama yang diusulkan de Tracy bagi upaya yang pertama dan ambisius ini adalah 'ideologi', jelasnya ilmu tentang ide. Disini ditemukan bahwa kata

⁵ *Ibid.*, hlm. 49

⁶ *Ibid.*, hlm 52

'ideologi' pada saat itu bermakna positif, berguna dan sesuatu yang benar-benar teliti dan tepat dalam konteks pengetahuan.

Karena sarat kontroversi, tak heran jika makna ideologi berubah menjadi jelek (peyoratif). Lantas, dari mana datangnya perubahan makna ideologi yang bersifat peyoratif itu, Thompson, itu semua bermula dari Napoleon Bonaparte (1796-1821). Ketika berhadapan dengan kekuasaan tradisional yang legitimasinya semakin memudar, Bonaparte adalah orang yang tertarik pada karya de Tracy karena mendukung ambisi politiknya. Tapi, begitu kursi kekaisaran telah didudukinya, Bonaparte berpaling memusuhi kelompok de Tracy. Kali ini, demi memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tradisional, khususnya gereja Katolik, Bonaparte menuduh kelompok de Tracy sebagai Ideologis.⁷

Napoleon kemudian memulai sebuah kritik yang panjang dimana ia menghubungkan ideologi dengan sifat-sifat seperti keinginan *a priori* untuk menjatuhkan kehidupan lama atau tradisional dan "memajukan" kehidupan manusia, dan atau untuk mendukung keyakinan yang cocok dengan kepentingan mereka yang memproklamirkan ideologi tersebut (de Tracy adalah seorang republikan liberal yang membayangkan suatu dunia baru di mana kaum intelektual seperti dirinya akan memainkan suatu peranan yang signifikan.)

Sejak saat itu, demikian kata Thompson, Ideologi diasosiasikan dengan orang yang visioner dan teoritikus yang tidak bersentuhan dengan kenyataan, tapi

⁷ *Ibid.*, hlm. 53-55

pada saat yang sama tetap berpegang pada pandangannya sendiri, keras kepala, dan dogmatik.

Telah dijelaskan di atas bahwa dengan sangat perlahan mulai terjadi evolusi pengertian ideologi, dari yang semula bersifat netral menjadi sebuah penghakiman terhadap perbedaan atas dasar kepentingan politik; dari sebuah ilmu yang mempelajari tentang gagasan menjadi sebuah pengertian yang sinis, jelek, dan tidak ilmiah.. "Karena pikiran anda beda sama saya, maka pikiran kamu itu ideologis." Di sini istilah ideologi kedudukannya lebih rendah dari ilmu pengetahuan atau teori. Mungkin itu sebabnya kaum intelektual lebih menikmati disebut akademis, filsuf, atau teoritikus, ketimbang disebut sebagai ideolog.

B. Ideologi dalam Pengertian Kontemporer

Pandangan klasik tentang ideologi ini kini menuai kritik tajam. Pandangan klasik dan pejoratif tentang ideologi telah mengaburkan fakta, bahwa ideologi sebenarnya beroperasi dalam ranah kehidupan sehari-hari, bahkan lebih dominan dalam suatu tatanan sosial tertentu. Bahkan ideologi sebagai praktek kebudayaan relatif memiliki otonominya sendiri, dan tidak bisa direduksi begitu saja kekuatan-kekuatan produksi dan kelompok ekonomi. Dalam kebudayaan sehari-hari, dalam seni pertunjukan rakyat, Tayub, ketoprak atau seni ludruk, bahkan dalam ritual istighasah,⁸ misalnya, bisa bersifat ideologis, atau dimasuki oleh

⁸ Dalam tradisi NU terdapat ritual yang menjadi identitas warga NU yang dikenal dengan istilah istighotsah. Ia berarti doa memohon kepada Allah keselamatan dan terjaga dari malapetaka.

berbagai kepentingan dan kekuasaan. Ideologi tidak lagi terpusat dan menjadi doktrin politik person kekuasaan, melainkan tersebar dalam ranah keseharian, sebagaimana kekuasaan yang tersebar dalam seluruh tatanan sosial.

Untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena ideologi ini, penulis banyak memanfaatkan insight para pemikir dan filsuf (post)strukturalis, khususnya Louis Althusser⁹ sekaligus insiht dari disiplin antropologi dan sejarah yang ikut menyumbang hal yang amat penting dalam perkembangan konsep ideologi.

1. Ideologi sebagai Aparatus ideologis dan Represif

Menurut Althusser, ideologi tidak mencerminkan dunia real, melainkan merepresentasikan “hubungan-hubungan imajiner” individu-individu terhadap dunia real. Bagi Althusser ideologi merupakan ciri yang dibutuhkan masyarakat sejauh masyarakat mampu memberikan makna untuk membentuk anggotanya dan merubah kondisi eksistensialnya. Masyarakat manusia menyembunyikan ideologi sebagai elemen dan atmosfir yang sangat diperlukan bagi nafas dan kehidupan sejarah mereka.¹⁰

Sebagai sebuah tradisi, istighasah dalam perkembangannya tidak luput dari pengaruh kepentingan dan kekuasaan. Istighasah selain sebagai ritual doa, ia juga bisa menjadi simbol perlawanan warga NU atas peminggiran yang dilakukan rezim Orba. Kadangkala ia menjadi kekuatan pembela kekuasaan kelompok elit tertentu.

⁹ Althusser adalah pemikir strukturalis kelahiran Algiers Perancis pada 1918. Bergabung dengan Partai Komunis tahun 1948. Karyanya yang berpengaruh adalah *For Marx* (1965) dan *Lenin and Philosophy* (1969). Pemikirannya hendaknya mempertemukan Marxisme dengan strukturalisme.

¹⁰ Lihat, John B. Thompson, *Analisis Ideologi*, Penerbit IRCISOD, Yogyakarta; lihat juga John Storey, *Teori Budaya dan Budaya Pop* (terj.), Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2003, hal.160-172.

Kedua, ideologi memiliki eksistensi material, yakni aparatus-aparatus dan praktek-prakteknya sehingga di dalamnya ideologi bisa hidup. Dalam aparatus dan praktek-praktek inilah ideologi diyakini dan dihayati oleh semua kelompok, dan terus mereproduksi kondisi-kondisi dan hubungan tatanan masyarakat yang sudah ada, yakni tatanan masyarakat industri kapitalis. Menurutnya, agar ideologi diterima, diyakini dan dihayati oleh semua kelompok, maka ia harus dimaterialkan. Ideologi hidup dalam praktek-praktek kelompok kecil, dalam citraan, dan obyek yang digunakan dan ditunjuk masyarakat, dan dalam organisasi-organisasi. Misalnya, pada sekolah-sekolah, rumah tangga, organisasi perdagangan, media massa, olahraga, pengadilan, partai politik, universitas dan seterusnya. Ideologi, menurut Althusser, eksis dalam dan melalui lembaga-lembaga ini. Aparatus adalah eksistensi material ideologi.¹¹

Ketiga, ideologi membentuk individu-individu konkrit menjadi subyek. Dalam aparatus-aparatus, ideologi disosialisasikan dan diinterpelasi dalam diri subyek. Interpelasi subyek ini lalu membentuk realitas nampak pada kita sebagai 'benar' dan 'jelas'.¹² Misalnya begini: ketika kita bersepeda motor, tiba-tiba ada bunyi peluit di belakang kita. Serentak terbayang dalam benak kita: ada polisi dan ada pelanggaran yang mungkin kita lakukan. Lalu kita memalingkan muka dan berbalik. Hadirnya disposisi tentang

¹¹ Louis Althusser, *Tentang Ideologi; Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Terj. Olsy Vinoli Arnof, (Yogyakarta, Jalasutra, 1984), hlm. 22-24

¹² *Ibid.*, hlm. xvi

‘benar/salah’, atau ‘melanggar/tidak melanggar’ serta adanya ketundukan atas wacana otoritas (polisi) pada dasarnya telah menunjukkan hadirnya suatu ideologi. Ideologi menggerakkan diri kita secara nir-sadar, melalui proses interpelasi subyektif. Jikalau seandainya kita tidak mengakui bahwa interaksi dengan polisi adalah ideologis, justru di situlah kekuatan ideologi. Yakni ‘denegasi’ praktis dari karakter ideologi sendiri. Ideologi bekerja secara nir-sadar dan menjadi bagian hidup dan gaya hidup sehari-hari.

Aparatus-aparatus ideologis ini merupakan alat hegemoni¹³ yang paling canggih untuk melanggengkan kekuasaan, melestarikan struktur kelas dominan, dan mengabadikan penindasan. Caranya, dengan mengusahakan sedapat mungkin agar ideologi itu diyakini oleh seluruh kelas dan kelompok, baik kelas berkuasa maupun yang dikuasai. Menurut Althusser, di sinilah ciri-ciri ideologi yang membingungkan itu memainkan peran. Fungsi kelas ideologi adalah bahwa ideologi yang berkuasa adalah ideologi dari kelas yang berkuasa; Ideologi berkuasa membantu kelas penguasa dalam menguasai kelas tereksplorasi sekaligus memapankan dirinya sendiri sebagai kelas penguasa.

¹³Althusser memang banyak mengambil gagasan-gagasan Antonio Gramsci terutama tentang intelektual organik. Intelektual organik yang dimaksudkan oleh Gramsci tertuju pada individu-individu, namun Althusser menggunakannya pada komunitas yaitu intelektual organik kolektif. Yakni kuasa negara dengan aparat-aparat ideologisnya. Althusser menyebutnya dengan istilah Ideological State Apparatus (ISA) yang bersifat ideologis. Ini ia bedakan dengan Repressive State Apparatus (RSA) yang bersifat represif. Keterangan dari Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatus” *Ibid.*, hlm. xxiv

Teori ideologi sebagai penipuan penguasa memperlihatkan bahwa mereka yang berada dalam posisi dominan sesungguhnya sama sekali tidak hadir secara alamiah atau karena keahliannya. Karena jika benar demikian maka tidak lagi dibutuhkan ideologi, juga tak perlu menjelaskan atau mempertahankan eksploitasi mereka. Sebaliknya ini menunjukkan persistensi stratifikasi sosial-politik dan ideologi dominan memerlukan legitimasi dua belah pihak dari penguasa dan yang dikuasai. Bila ideologi ini diterima oleh kedua pihak, ini artinya struktur kekuasaan dan *privelegi* yang timpang itu bisa dilestarikan. Dalam konteks ini ideologi sering menggunakan “bahasa resiprositas”. Dia mencontohkan bahwa imperialisme menganggap dirinya sah karena merasa bertanggung jawab atau berjasa membangun unit-unit sosial dan pentingnya hubungan sosial yang harmonis.¹⁴

Apa yang dikemukakan Althusser ini memberikan insight baru tentang gagasan bagaimana ideologi itu dibentuk dan pertahankan serta apa efek-efeknya. Misalnya: bagaimana perbedaan kelas diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga sosial seperti sekolah; bagaimana institusi pendidikan itu menempatkan masyarakat dalam relasi kelas-kelas yang ada; bagaimana mitos tentang persamaan individu, persamaan kesempatan, dan prestasi individu dimasukkan dalam teks dan praktek program sekolah dan kebijakan

¹⁴ Dengan gagasan ini tampak sekali bahwa Althusser benar-benar seorang marxis tulen, bahwa ideologi borjuis bukan hanya dimiliki oleh kaum kapitalis tapi juga diappropriasi oleh kaum proletar. Di sini samar-samar gagasan Gramsci mengenai pentingnya hegemoni untuk meraih konsensus sangat kelihatan.

pendidikan nasional.¹⁵ Mitos-mitos kesamaan yang tumbuh dalam “produksi ketaksamaan” ini (produksi ketidaksetaraan kelas dan kelompok sosial, diskriminasi gender, misalnya) menunjukkan gagasan-gagasan yang ideologis.

2. Ideologi Sebagai Alat Hegemoni

Sebagaimana disinggung di atas hegemoni merupakan gagasan sentral dalam pemikiran Gramsci mengenai strategi perubahan sosial. Konsep ini pertama-tama muncul dalam rangka mengoreksi kegagalan revolusi sosialisme di negara-negara Barat, termasuk Italia, sekaligus mengevaluasi gagasan dasar Marxisme ortodoks paska Marx dan Engel yang menyatakan bahwa akibat kontradiksi-kontradiksi internalnya kapitalisme niscaya akan hancur dengan sendirinya digantikan dengan masyarakat sosialis melalui revolusi proletariat.

Hegemoni adalah konsep penting dalam tulisan-tulisan Gramsci, meski ia dipakai dalam berbagai pengertian. Konsep ini muncul berbarengan dengan upaya Gramsci untuk memajukan revolusi sosialis dalam rangka menghancurkan tatanan dan sistem kapitalisme. Pertama-tama yang harus dikatakan adalah bahwa Gramsci menggunakan istilah ini sebagai konsep yang netral, tidak bersifat baik atau buruk. Artinya, dia menggunakan konsep hegemoni dalam kerangka realitas perjuangan kelas dalam suatu tatanan masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19

Kadang-kadang Gramsci mengidentifikasi hegemoni dengan kekuatan politik yang dijalankan dengan paksaan, tetapi pada umumnya ia menunjuk kepada kontrol terhadap kehidupan intelektual masyarakat melalui sarana-sarana kebudayaan.¹⁶ James Joll secara gamblang menjelaskan bahwa hegemoni suatu kelas politis berarti bahwa kelas tersebut berhasil membujuk kelas-kelas sosial lain untuk menerima nilai-nilai budaya, politik, dan moral dari kelas itu. Oleh karena itu hegemoni lebih terkait dengan upaya mencapai kekuasaan politik melalui konsensus antar kelas daripada melalui kekerasan. Bahkan dalam suatu hegemoni yang berhasil, kekuatan koersif sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kelas berkuasa.

Dengan konsep hegemoni ini Gramsci menyadari pentingnya peran kebudayaan dalam revolusi sosialis, suatu faktor yang kurang memperoleh perhatian sebelumnya dalam analisis Marxisme ortodoks yang terlalu dibutakan oleh kerangka “basis-supra struktur”.¹⁷ Kerangka ini sebagaimana disebut oleh Magnis Suseno menyimpan kekonyolan pengertian ekonomistik, perubahan dalam basis struktur ekonomi menentukan perubahan dalam level suprastruktur politik, ideologi dan kebudayaan. Revolusi sosialis dianggap tergantung seratus persen dari perkembangan perekonomian kapitalistik. Adapun Gramsci dalam konteks ini sebenarnya mengikuti apa yang telah dilontarkan Lenin bahwa tanpa tekad revolusioner segala perkembangan

¹⁶ Mansour Fakih, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta, Insist, 2002), hlm. 142

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 140

ekonomis dengan sendirinya tidak pernah akan menghasilkan revolusi apapun. Karenanya Lenin memandang perlu hadirnya sebuah partai revolusioner pada khazanah pemikiran Marxis.¹⁸ Dan melalui kepemimpinan partai ini Lenin telah membuktikan bahwa revolusi sosialis bisa dijalankan di Rusia.

Dari paparan di atas makin jelas bahwa sebuah revolusi sosialis tidak dapat dilakukan secara gampang tatkala semua kecenderungan, hasrat, perasaan dan kepentingan masyarakat berada dalam hegemoni kelas borjuis. Dalam konteks ini Gramsci menolak pandangan Rosa Luxemburg bahwa krisis ekonomi dalam sistem kapitalisme akan mendorong reaksi spontan masyarakat untuk menghancurkan sistem kapitalisme melalui partai dan sindikat-sindikat para pekerja. Sebaliknya ia menegaskan bahwa revolusi adalah proses organik dan molekular yang membutuhkan pengorganisasian aktifitas sadar dan kesadaran kritis. Ini artinya suksesnya revolusi proletariat juga sangat ditentukan oleh prasyarat persiapan intelektual, budaya dan politik kelas masyarakat bawah sendiri.

Dengan kata lain, perubahan sosial politik baru bisa dimungkinkan jika masyarakat bawah terlebih dahulu berhasil merebut hegemoni kultural dengan menyingkirkan hegemoni kaum borjuasi yang menindas. Ini artinya sebelum mengambil alih kekuasaan politik, kelas buruh dan masyarakat bawah lainnya harus bisa mengambil alih pandangan dunia, nilai-nilai, dan harapan-harapan

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 233

seluruh masyarakat atau paling tidak kelas-kelas penting, karena dalam rangka menciptakan sistem masyarakat yang baru itu diperlukan sebuah kebudayaan yang baru pula. Upaya pengambilalihan atau perebutan hegemoni inilah yang disebut Gramsci sebagai “perang posisi” (*war of position*).¹⁹

Strategi tersebut digunakan Gramsci dalam rangka untuk mematahkan hegemoni borjuasi dalam masyarakat sipil melalui kepemimpinan intelektual, kultural dan ideologis dalam lembaga-lembaga privat, sekolah-sekolah, gereja, industri, asosiasi kota dan pedesaan, dan lain-lain. Gramsci membedakan antara “perang posisi” (*war of position*) dan “perang gerak” (*war of movement*) dalam kerangka strategi yang berbeda dalam perebutan kekuasaan. Yang pertama merujuk pada perebutan kekuasaan yang dilakukan melalui konfrontasi langsung, sementara yang kedua melalui proses gradual dan molekular yang menyiapkan kondisi bagi kekuatan sosialis progresif untuk merebut kekuasaan. “Perang gerak” hanya bisa dilakukan bila masyarakat sipil sangat lemah, sementara diperlukan “perang posisi” bila masyarakat sipil dalam negara itu sangat kuat.²⁰

Dengan belajar dari Rusia, Gramsci percaya bahwa keberhasilan Lenin merealisasikan revolusi proletariat di Timur, tidak dengan mudah bisa diikuti oleh negara-negara Barat. Perbedaan-perbedaan struktural antara Rusia dan Barat secara otomatis juga mengharuskan kaum proletar untuk membangun strategi politik berbeda. “Perang gerak” sebagaimana yang diterapkan Lenin di Rusia

¹⁹ *Ibid.*, hlm, 142

²⁰ Mansour Fakih, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik*, hlm. 142-143

dianggap lebih cocok karena kondisi masyarakat sipil di sana sangat lemah di bawah kepemimpinan Tsar. “Perang gerak” ini sangat berhasil di Rusia karena kekuatan masyarakat sipil yang merupakan gabungan dari elit feodal, borjuis dan intelektual yang berkuasa di satu pihak dan massa petani yang berada dipinggiran kehidupan politik di pihak lain, sangat lemah; sementara kekuasaan negara tersentralisasi dan terkonsentrasi pada diri seorang kaisar Tsar. Dan dalam kondisi tersebut “perang gerak” lebih strategis dan efektif untuk merebut kekuasaan secara langsung.

Adapun di Italia kekuatan negara borjuasi tertanam dalam masyarakat sipil yang kuat dan kompleks. Negara memperoleh kekuatan dan sokongan dari jaringan organisasi-organisasi privat, sekolah, gereja, asosiasi pedesaan dan masyarakat urban, dan para industrialis utara. Tambahan lagi kapitalisme barat dan Italia sukses menciptakan blok politik, menyerap elemen-elemen budaya kelas pekerja dan menyatukan massa rakyat ke dalam struktur hegemonik. Realitas politik inilah yang menyebabkan “perang gerak” tidak berhasil dan tidak bisa diharapkan lagi. Sehingga dalam struktur politik di mana masyarakat sipil sangat kuat dalam hegemoni kaum borjuasi maka strategi yang lebih masuk akal adalah “perang posisi” dengan menggerogoti kekuatan kultural dan ideologi borjuasi.

Gramsci yakin bahwa hegemoni borjuasi ini bisa dipatahkan melalui strategi “perang posisi”. Ini dikarenakan sebenarnya konsensus antara kelas-kelas sosial yang memapankan masyarakat borjuis adalah semu dan superfisial belaka,

sehingga tatanan sosial yang dibangun pun hanya kelihatannya saja universal. Apa yang nampak sebagai kepentingan bersama seluruh masyarakat hanyalah kedok kepentingan kelas borjuasi. Karena dalam kenyataannya eksploitasi kelas-kelas buruh masih terus berjalan.²¹

Kemudian dalam rangka mematahkan hegemoni borjuasi dan merumuskan pandangan dunia baru kelas proletar ini, Gramsci memiliki instrumen favorit yang sangat penting, yakni “intelektual organik”.²² Kelompok ini berperan signifikan untuk mengobarkan “perang posisi” guna mengambil alih hegemoni.

C. Fungsi Pentingnya Ideologi

Fungsi ideologi lainnya ialah menghubungkan masyarakat satu sama lain, dengan suatu dunia dan terutama diri mereka sendiri. Ideologi memberikan identitas tertentu.²³ Misalnya, jika seorang individu mengimani Tuhan kemudian pergi sembahyang secara teratur, mengakui dosa-dosanya dan seterusnya; keyakinan itu lalu direalisasikan dalam praktek-praktek tertentu yang diatur oleh ritual-ritual dengan menyediakan upacara-upacara yang melibatkan gerak dan sikap tubuhnya sebagai ekspresi kekuasaan yang saling terkait serta berhubungan dengan aparatus ideologis.

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa suatu gagasan memuat sekaligus tindakan, sentimen, dan gesturanya. Gagasan-gagasan itu hidup dalam

²¹ <http://nunu24.blog.com/3247857/>

²² Mansour Fakih, *Jalan Lain.....*hlm. 136

²³ *Ibid.* hal. 41.

tindakan-tindakan. Tindakan ini lalu menjadi praktik sehari-hari yang dikendalikan oleh ritual yang dia lakukan. Tiga hal ini (gagasan, praktek dan ritual) merupakan aspek material dari aparatus ideologis. Dalam aparatus itu ideologi bekerja, memproduksi subyektifitas, dan menegaskan identitas tentang siapa kita sesungguhnya.

Semakin jelas sekarang, gagasan-gagasan Althusser di atas memberi saham besar bagi pemikiran baru tentang konsep ideologi. Ideologi tidak lagi dilihat sebagai salah atau benar, tapi justru memberikan kerangka dasar fundamental bagi individu dalam menafsirkan pengalaman dan 'hidup' sesuai dengan kondisi mereka. Kerangka dasar ini tidak hanya bersifat mental, tapi eksis sebagai praktis hidup kelompok sehari-hari. Dengan menganggap ideologi sebagai praktek-praktek material atau praktek budaya, maka kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya ideologi itu hidup bergerak dan karena itu pula manusia sendiri selalu hidup dalam suatu ideologi, di dalam representasi tertentu dari dunianya.

Dalam praktek-praktek kebiasaan-kebiasaan sehari-hari inilah ideologi sesungguhnya direproduksi. Yakni, melalui aparatus-aparatus ideologis sebagaimana ditegaskan oleh Althusser. Jika demikian, praktis ideologi memasuki seluruh ruang dalam kehidupan sehari-hari kita secara nir-sadar. Ideologi menjadi bagian organik dari seluruh totalitas sosial dan dalam aktifitas keseharian.²⁴

²⁴ Amrih Widodo dalam penelitian antropologinya terhadap pertunjukan Tayub di daerah Blora Jawa Tengah menunjukkan bahwa Tayub yang pada awalnya sebagai pertunjukan rakyat atau

Karena unit-unit sosial merupakan bentukan ideologis, produk dari formasi diskursif kekuasaan (menurut Foucault) atau efek-efek dari apparatus ideologis yang beragam (dalam bahasa Althusser), maka untuk memahami totalitas sosial dan budaya ini membutuhkan “eksegesis” sebagaimana teks-teks sejarah dan sastra.

Pandangan bahwa ideologi merupakan fenomena keseharian ini tidak lantas berarti cengkeraman ideologi sudah lemah, atau mungkin dianggap telah berakhir. Justru ideologi dan kekuasaan telah mencengkeram seluruh tatanan sosial secara lebih luas dan kompleks ketimbang apa yang selama ini dibayangkan. Ideologi beroperasi di semua lini dan diproduksi terus-menerus dalam ritual-ritual dan perkumpulan-perkumpulan, kesenian-kesenian, dan citraan-citraan ideologis di mana representasi-representasi dan kategori-kategori dibangkitkan dan disebar. Oleh karena itu, kini ideologi tidak lagi bisa dipahami sekadar sebagai produk kelas berkuasa atau efek dari kekuatan-kekuatan produksi. Melainkan hasil dari kombinasi berbagai elemen lain dan kekuasaan yang kompleks dan tersebar.

Di dalam diskursus kebudayaan mutakhir, sebagaimana pandangan Stuart Hall, kebudayaan sesungguhnya tidak lagi bisa dipahami sebagai cerminan

bagian dari ritual sunatan, bersih deso, dan perkawinan mulai berubah selama periode 1987-1991. Pemerintah memasukkan ideologinya (kepentingan industri pariwisata dan simbol kedaerahan) dengan ‘meningkatkan statusnya’ menjadi Seni Tayub. Diantaranya dengan melakukan pembinaan dan program penataran untuk merubah struktur dan keaslian Tayub. Lihat Amrih Widodo, *The Stage of the State, Art of the People and Rites of Hegemonization*. Paper ini dipresentasikan pada seminar bertajuk “Basis-basis Material Kebudayaan” yang diselenggarakan oleh Yayasan SPES dan Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, 4 September 1991.

praktek-praktek lain di dunia idea. Melainkan ia sendiri adalah sebuah praktek, yakni praktek “penandaan” yang menghasilkan makna. Jadi bagi kaum strukturalis dan post-strukturalis, penekanan studi kebudayaan kini bergeser dari masalah isi budaya ke arah tipe-tipe penataan (ordering), dari pertanyaan tentang apa ke bagaimana sistem-sistem budaya itu. Misalnya, dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan sarana komunikasi sekarang ini, masyarakat betul-betul dicekoki oleh produksi konsumsi. Di sini kekuatan modal menghadirkan kekuasaan representasi melalui kuasa tanda dan simbol: dalam iklan dan mode, misalnya. Konsekuensi politiknya adalah bahwa seluruh tatanan sosial sesungguhnya adalah hasil sebuah konstruksi saja dari, dan berbarengan dengan, kekuasaan modal yang diproduksi secara terus menerus.

Singkatnya, ideologi sekarang ini merupakan praktek budaya; suatu efek yang bersifat kultural dan terkait dengan institusi-institusi, kelompok-kelompok, dan struktur-struktur tertentu. Ideologi beroperasi secara ‘tersebar’ (decentered) dan menghadirkan dirinya dalam ‘ideologi-sebagai-kebudayaan.’ Artinya, ideologi berada dalam kompleksitas hubungan-hubungan antara berbagai bentuk kebudayaan (pengetahuan, citraan, dan lain-lain) dan institusi-institusinya, serta wacana-wacana dan aparatus-aparatusnya.²⁵

Lalu pertanyaannya bila kebudayaan sehari-hari tidak lepas dari ideologi, bagaimana dengan sains ilmiah. Apakah ia juga bersifat ideologis? Foucault

²⁵ Edith Kurzweil, *jaring kuasa strukturalisme*, terj. Nur Hadi (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2004), hlm. 290-291

menegaskan bahwa relasi-relasi kekuasaan tidak berada di luar tipe-tipe relasi-relasi seperti proses ekonomi, relasi pengetahuan, relasi seksual, dan lain-lain. Melainkan kekuasaan justru imanen dalam proses relasi itu.²⁶ Kekuasaan adalah beragam relasi-relasi kekuatan yang beroperasi dan membentuk organisasi dalam ruang itu. Dengan demikian, sains sosial kini juga harus dilihat sebagai konfigurasi kekuatan-kekuatan itu yang membentuk landscape modernitas dan modernitas akhir. Sains sosial sendiri merupakan kekuatan dan bentuk kebudayaan yang tak bebas dari kepentingan. Demikian juga sains alam. Ia juga tak lepas dari kepentingan-kepentingan atau konsensus komunitas ilmuwan.

Dari uraian di atas makin jelas membuka tabir beroperasinya ideologi dengan memikirkan kembali kekuasaan, cara kerja, dan manifestasi-manifestasinya, tak terkecuali dalam sains sosial. Tidak ada batas-batas lokasi ideologi. Ideologi tidak hanya ada dalam kolektifitas masyarakat borjuis atau dalam struktur-struktur kekayaan dan kerja mereka, melainkan tersebar ke seluruh tatanan sosial. Ia bukan hanya bersifat mental, tapi juga bereksistensi material dan historis. Ada keterkaitan antara pengetahuan dan institusi-institusi, bidang-bidang pengetahuan dan praktek-praktek kebudayaan sebagai tempat berbagai kekuasaan (sosial, ekonomi, politik) diproduksi.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 317-318